

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
BELANJA LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**NAMA : Jeri Handaka
NIM : 22 2012 116**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
BELANJA LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : Jeri Handaka

NIM : 22 2012 116

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeri Handaka

NIM : 22 2012 116

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan


PT TERAI TEMPEL
0000
Jeri Handaka

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap
Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan
Nama : Jeri Handaka
NIM : 22 2012 116
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Juli 2018

Pembimbing I,


M. Orba Kurniawan, SE.,SH.,M.Si.,BKP
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II,


Aprianto, SE.,M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Mengetahui,
Dekan

u.t. Ketua Program Studi Akuntansi


Betri Siratuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PRAKATA

Assalammua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbila'lamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk ayah dan ibunda yang sangat kusayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata yang paling indah selain doa yang bisa kuberikan untuk kalian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE.,SH.,M.Si.,BKP dan Bapak Aprianto, SE.,M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Terima kasih untuk istriku, yang telah memberikan motivasi dan tak henti-hentinya memberikan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih untuk orang tuaku, ayahku dan ibundaku yang telah memberikan motivasi bagi penulis yang telah mengembangkan Ilmu Pengetahuan serta tak henti-hentinya memberikan do'a dan restu serta bantuan baik moril maupun materil.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. *Akhirul kalam* dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi perbaikan perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan informasi dan wacana bagi pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Februari 2019

Penulis

Jeri Handaka

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Pajak Daerah	11
2. Dana Alokasi Umum.....	17
3. Belanja Langsung.....	20
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29
D. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Operasionalisasi Variabel.....	34
D. Populasi dan Sampel	34
E. Data yang Diperlukan	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	42
2. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	68
3. Pengolahan Data.....	81
B. Pembahasan.....	92
1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung...92	
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung	93
3. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2015-2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	7
Tabel III.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
Tabel IV.1	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah)	71
Tabel IV.2	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	71
Tabel IV.3	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	72
Tabel IV.4	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	72
Tabel IV.5	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	73
Tabel IV.6	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah)	74
Tabel IV.7	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	74
Tabel IV.8	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	75
Tabel IV.9	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	75
Tabel IV.10	Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	76

Tabel IV.11 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah)	77
Tabel IV.12 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	77
Tabel IV.13 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	78
Tabel IV.14 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	78
Tabel IV.15 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	79
Tabel IV.16 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah)	80
Tabel IV.17 Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 - 2017 (dalam Jutaan Rupiah).....	80
Tabel IV.18 Data Penelitian	81
Tabel IV.19 Hasil Statistik Deskriptif	82
Tabel IV.20 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	84
Tabel IV.21 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	86
Tabel IV.22 Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
Tabel IV.23 Koefisien Variabel Independen.....	88
Tabel IV.24 Hasil Uji Signifikan Simultan	89
Tabel IV.25 Hasil Uji Signifikansi Parsial	90
Tabel IV.26 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar IV.1	Wilayah Prioritas Intervensi berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Share PDRB Sumatera Selatan 2015.....	70
Gambar IV.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data dan Hasil Pengolahan Data
- Lampiran 2 : Fotocopy Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Fotocopy Surat Bukti Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Berita Acara Seminar Usulan Penelitian
- Lampiran 5 : Fotocopy Daftar Hadir Seminar Penelitian
- Lampiran 6 : Fotocopy Lembar Perbaikan Skripsi
- Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Hafalan AIK
- Lampiran 8 : Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 9 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Penulisan Skripsi
- Lampiran 10 : Biodata Peneliti

ABSTRAK

Jeri Handaka/222012116/Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh variabel pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung daerah. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan dana alokasi umum sedangkan variabel terikat adalah belanja langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2017. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, pajak daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Besarnya pengaruh dari dua variabel ini yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 41.7%. Sedangkan sisanya 58.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

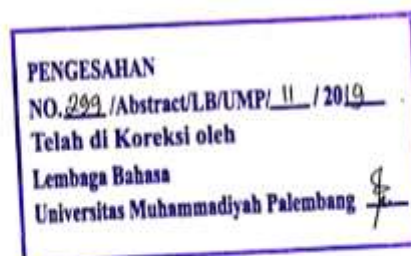
Kata Kunci: *Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung*

Abstract

Jeri Handaka / 222012116 / 2019 / The Effect of Regional Taxes and General Allocation Funds on Direct Expenditures in Kabupaten/Kota of South Sumatra Province.

The purpose of this study was to determine the effects of regional taxes and general allocation funds on direct expenditure in Kabupaten/Kota of South Sumatra Province. The type of research in this study was associative research which was to determine the value of the effects of regional taxes variables and general allocation funds on direct expenditure. The independent variables in this study were local taxes and general allocation funds while the dependent variable was direct expenditure. The population in this study was the realization of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Kabupaten/Kota of South Sumatra Province for 3 years, from 2015 to 2017. The technique for determining this sample used the census method which was a method of determining the entire population. Data collection techniques that would be used in this study were literature searches. The results of the study showed that local taxes had a significant effect on direct expenditure in Kabupaten/Kota of South Sumatra Province. Whereas general allocation funds did not have a significant effect on direct expenditure in Kabupaten/Kota of South Sumatra Province. Meanwhile, regional taxes and general allocation funds jointly had a significant effect on direct expenditure in Kabupaten/Kota of South Sumatra Province. The magnitude of the effects of these two variables, namely Regional Taxes and General Allocation Funds for Direct Expenditure was 41.79%. While the remaining 58.3% was explained by other variables not examined in this study.

Keywords: Regional Taxes, General Allocation Funds, Direct Spending.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka terwujud nya pembangunan Nasional. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2004).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan

batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2004). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2004).

Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentunya dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan

kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak pada aspek

akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" diperhitungkan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan

semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrumen *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja).

Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, *et.al* (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2004) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil

keputusan atas nama prinsipal. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Menurut Halim dan Abdullah (2006), menyatakan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *prinsipal-agen*. Tidak adanya kesinkronan dalam hal utilitas merupakan hal yang muncul akibat permasalahan keagenan yang berasal dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Penyusunan APBD diawali dengan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan plafon anggaran yang akan menjadi untu pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Hal ini dapat terlihat di Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur serta rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Berikut ini realisasi pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja langsung daerah pada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode tahun 2015 sampai 2017:

Tabel I.1
Realisasi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Periode Tahun 2015-2017 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah			Dana Alokasi Umum			Belanja Langsung		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Kab. Lahat	32,997	33,722	37,555	622,782	703,888	938,517	848,883	817,370	757,885
2	Kab. Musi Banyuasin	53,150	59,484	68,733	131,033	324,838	347,346	1,014,467	1,229,177	1,488,996
3	Kab. Musi Rawas	22,466	24,229	31,607	578,786	641,790	643,608	718,114	735,483	677,362
4	Kab. Muara Enim	70,755	52,949	51,788	610,384	673,162	785,356	1,122,491	1,094,747	796,483
5	Kab. Ogan Komering Ilir	34,190	21,850	25,889	958,999	1,049,995	1,052,112	789,179	957,747	882,929
6	Kab. Ogan Komering Ulu	27,486	26,339	22,308	568,563	635,552	636,452	498,157	401,473	467,930
7	Kota Palembang	479,113	536,553	602,013	1,210,605	1,292,125	1,507,479	1,263,713	1,242,349	1,589,527
8	Kota Prabumulih	20,180	21,850	30,345	406,701	414,174	415,882	539,765	474,209	521,723
9	Kota Pagar Alam	5,545	5,762	5,165	351,582	390,188	390,845	483,187	472,281	462,365
10	Kota Lubuk Linggau	19,666	22,255	29,252	415,550	446,789	448,144	389,061	397,606	350,616
11	Kab. Banyuasin	39,303	56,842	55,730	829,437	930,551	931,958	759,456	727,365	857,493
12	Kab. Ogan Ilir	13,341	62,844	178,608	557,403	623,839	625,366	338,917	377,873	713,155
13	Kab. OKU Timur	19,946	21,196	19,021	693,715	760,212	762,354	457,152	623,415	644,418
14	Kab. OKU Selatan	11,081	8,016	7,851	523,634	588,216	590,456	476,866	565,139	528,518
15	Kab. Empat Lawang	9,063	9,773	10,752	366,775	416,953	419,599	449,558	379,948	421,146
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,991	7,110	29,842	186,115	319,054	331,768	169,468	580,450	673,422
17	Kab. Musi Rawas Utara	7,558	13,052	11,458	324,442	378,122	395,256	457,273	562,693	538,985

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan

Dari data realisasi di atas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki belanja langsung yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Belanja langsung terbesar di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2017 dimiliki oleh Kota Palembang dan diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan belanja langsung terkecil dimiliki oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2015. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam membiayai belanja langsung masih bergantung pada dana alokasi umum dari pemerintah pusat, dimana terlihat dari jumlah dana alokasi umum yang lebih besar daripada

pajak daerah. Dapat disimpulkan bahwa ketergantungan daerah pada dana pemberian dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Pertumbuhan pajak daerah yang meningkat setiap tahunnya dari 2015 sampai 2017, memiliki hubungan yang positif dengan belanja langsung yang ikut meningkat setiap tahunnya. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ada 3 kabupaten/kota yang memiliki relevansi hubungan pertumbuhan positif antara pajak daerah dengan belanja langsung daerah dimana belanja langsung daerahnya setiap tahun selalu mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sementara itu, pertumbuhan dana alokasi umum yang meningkat setiap tahunnya dari 2015 sampai 2017, memiliki hubungan yang positif dengan belanja langsung yang ikut meningkat setiap tahunnya. Dari 17 kabupaten/kota ini ada 4 kabupaten/kota yang memiliki relevansi hubungan pertumbuhan positif dengan belanja langsung daerah dimana belanja langsung daerahnya setiap tahun selalu mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai data realisasi di atas bahwa pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Belanja langsung di masing-masing daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh dana alokasi umum dan pajak daerah. Namun, kontribusi

pajak daerah terlihat lebih kecil dibandingkan dana alokasi umum. Jadi sumbangan antara pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung daerah cenderung lebih dominan dipengaruhi oleh dana alokasi umum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah dan dana alokasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja langsung daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang Indonesia: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159.
- Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Ke Empat. Jakarta. STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M, dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Edisi ke 2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santoso, Singgih. 2012. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Sidik, Machfud. 2004. *Bunga Ranpai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Warsito, Kawedar., Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.